ABSTRAK

Allysa Novita Putri, NIM 12102193052, Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah (Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata Kunci: Penetapan, Perkawinan Beda Agama, dan Maqāṣid Al-Syarī'ah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena maraknya perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Padahal jika melihat peraturan yang ada di Indonesia sebagian besar ketentuan mengarah pada pelarangan perkawinan beda agama, jika agama pun tidak mengijinkan. Sepertinya halnya pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fatwa MUI dan KHI, sebagian gereja dalam agama Kristen dan agama Hindu serta dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun demikian, peraturan terkait perkawinan beda agama di Indonesia mengalami kontradiksi dengan melihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang digunakan hakim dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan untuk mengijinkan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama. Padahal jika melihat dari segi dampak yang dapat saja terjadi atas perkawinan beda agama ini pastinya banyak menimbulkan mafsadat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim, legal reasoning, dan amar penetapan dalam perkara permohonan perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla, serta bagaimana perspektif maqāṣid al-syarī'ah mengenai kedua penetapan perkawinan beda agama tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang dasar pertimbangan hukum, legal reasoning, dan amar penetapan dalam perkara permohonan perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla serta mendiskripsikan kedua penetapan tersebut dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah

Penelitian ini menggunakan penelitian library. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), analisis komparatif (comparative analysis) dan analisis kritik (critical analysis). Pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi, yakni dengan dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan prosedur penelitian yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akhir (simpulan dan saran).

Hasil penelitian ini adalah: 1) Pengadilan Negeri Surabaya, amarnya mengabulkan permohonan keseluruhan. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menurutnya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat digunakan sehingga terjadi kekosongan hukum. Untuk

mengisi kekosongan hukum tersebut hakim menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang tentang Perkawinan ditafsirkan hakim perbedaan agama bukan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu hakim juga mempertimbangkan syarat meteriil perkawinan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945 dijadikan hakim sebagai pertimbangan moral. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 digunakan hakim sebagai argumentasinya atas tata cara yang dapat dilakukan oleh para pemohon. Metode penemuan hukum yang digunakan yaitu interpretasi restriktif, gramatikal, comparative, dan ektinsif. Sedangkan Pengadilan Negeri Blora dalam amarnya menolak permohonan secara keseluruhan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang digunakan hakim sebagai mengkategorisasi perkara ini pada perkara perkawinan. Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan digunakan hakim mempertimbangkan syarat materiil. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang digunakan sebagai dasar argumentasi hakim untuk mempertimbangkan keabsahan berdasarkan agama dengan menggunakan Al-Baqarah ayat 221 dan Pasal 44 KHI dan saksi Yanto Pandagian yang merupakan pendeta di Gereja GBI Arumdalu. Metode penemuan hukum yang digunakan hakim adalam argumentum per analogiam, interpretasi gramatikal, interpretasi interdisipliner. Secara umum kedua penetapan ini menggunakan interpretasi sistematis. 2) Dalam hal Maqāṣid Al-Syarī'ah oleh Jamaluddin Athiyah, penatapan Pengadilan Negeri Surabaya tidak memelihara hifz al-tadayyun fi al-usrah dan hifz-nasab, namun menjaga hifz al-nasl. Pengadilan Negeri Blora dalam hal ranah keluarga menunujukkan penjagaan hifz al-tadayyun fi al-usrah dan hifz al-nasl. Dalam Maqāṣid Al-Syarī'ah oleh Jasser Auda dalam cognitive nature of system, keduanya memiliki pertentangan dan pembenaran. Pengadilan Negeri Surabaya tidak menujukkan sistem wholenes atau holistic, sedangkan Pengadilan Negeri Blora kurang dapat terlihat. Openness dan self-renewal dalam Pengadilan Negeri Surabaya terlihat, Pengadilan Negeri Blora tidak terlihat. Dalam sistem interrelatedness kedua penetapan ini menujukkan Maqāṣid al-'ammah namun dalam hal Maqāṣid khassah, sedangkan dalam maqāṣid juz'iyah, penetapan Pengadilan Surabaya tidak menunjukkan penjagaannya dan penetapan Pengadilan Negeri Blora menunjukkan. Kedua penetapan ini juga menggunakan sistem multi-dimensional. Terkait purposefullness, penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tidak menunjukkan penjagaan, sementara penetapan Pengadilan Negeri Blora menunjukkan.

ABSTRACT

Allysa Novita Putri, NIM 12102193052, Analysis of Interfaith Marriage Determination from Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspective (Determination Study Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby and Determination Number 71/Pdt.P/2017/PN. Bla), Islamic Family Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2023, Supervisor: Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Keywords: Establishment, Interfaith Marriage, and Maqāṣid Al-Sharī'ah

This research was motivated by the phenomenon of the rise of interfaith marriage that occurred in Indonesia. In fact, if you look at the existing regulations in Indonesia, most of the provisions lead to the prohibition of interfaith marriage, if religion does not allow it. It seems to be the case in Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 8 letter (f) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, MUI and KHI fatwas, some churches in Christianity and Hinduism and in several Constitutional Court decisions. However, regulations related to interfaith marriage in Indonesia contradict by looking at Article 21 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage juncto Article 35 letter (a) of Law Number 23 of 2006 and Article 10 paragraph 3 of Government Regulation Number 9 of 1975 which is used by judges as a basis for consideration to allow the implementation and registration of interfaith marriages. In fact, if you look at the impact that can occur on interfaith marriage, it certainly causes a lot of mafsadat.

The formulation of the problem in this study is how the basis for the judge's consideration, legal reasoning, and ammar determination in the case of interfaith marriage applications in Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby and Decree No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla, and what is the perspective of maqāṣid al-syarī'ah on the two interfaith marriage determinations? The purpose of this study is to describe the basis for legal considerations, legal reasoning, and ammar determination in the case of interfaith marriage applications in Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby and Decree No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla and describe the two determinations with the perspective of maqāṣid al-syarī'ah

This study used library research. In this study, the data collection technique used was documentation. This research uses content analysis methods, comparative analysis and critical analysis. Checking the validity of the data used by researchers is triangulation, namely by documentation, observation and interviews. In conducting research, researchers use research procedures, namely the planning, implementation, and final stages (conclusions and suggestions).

The results of this study are: 1) Surabaya District Court, finally granted the overall request. The basis for consideration used by the judge was the jurisprudence of Supreme Court Decision Number 1400 K / Pdt / 1986 dated January 20, 1989 according to which Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law could not be used so that there was a legal vacuum. To fill the legal vacuum, the judge used Article 35 of the Population Administration Law. Article 8 letter (f) of the Law on Marriage is interpreted by judges of religious differences not to prohibit marriage. In addition, the judge also considered the condition of marriage material based on Article 6 paragraph 1 and Article 7 of the Marriage Law. Article 28 and Article 29 of the

1945 Constitution are used by judges as moral considerations. Article 10 paragraph (3) of Government Regulation Number 9 of 1975 is used by the judge as his argument for the procedures that can be carried out by the applicants. The method of legal discovery used is restrictive, grammatical, comparative, and ectressive interpretation. Meanwhile, the Blora District Court in its decision rejected the application in its entirety. Article 1 of the Marriage Law is used by judges to categorize this case in marriage cases. Article 6 paragraph 1 and Article 7 of the Marriage Law are used by judges to consider material requirements. Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law is used as a basis for the judge's argument to consider validity based on religion using Al-Baqarah paragraph 221 and Article 44 KHI and witness Yanto Pandagian who is a pastor at GBI Arumdalu Church. The methods of legal discovery used by judges are argumentum per analogy, grammatical interpretation, interdisciplinary interpretation. In general, both of these designations use systematic interpretation. 2) In the case of Maqāṣid Al-Syarī'ah by Jamaluddin Athiyah, the Surabaya District Court did not maintain hifz al-tadayyun fi al-usrah and hifz-nasab, but guarded hifz al-nasl. The Blora District Court in the case of the family domain showed the safeguarding of hifz al-tadayyun fi al-usrah and hifz al-nasl. In Maqāṣid Al-Sharī'ah by Jasser Auda in the cognitive nature of systems, the two have contradictions and justifications. The Surabaya District Court does not show a wholeness or holistic system, while the Blora District Court is less visible. Openness and self-renewal in Surabaya District Court are visible, Blora District Court is not visible. In the system of interrelatedness these two determinations show Maqāṣid al-'ammah but in the case of Maqāṣid khassah, while in maqāṣid juz'iyah, the decision of the Surabaya Court does not indicate its safeguarding and the determination of the Blora District Court shows. Both of these assignments also use a multi-dimensional system. Regarding purposefulness, the Surabaya District Court's determination did not show guarding, while the Blora District Court's determination showed.

تجريدي

أليسا نوفيتا بوتري، NIM 12102193052، تحليل تحديد الزواج بين الأديان من منظور مقاصد السياريعة (دراسة التحديد رقم Pdt.P/2022/PN. Sby/916 والقرار رقم Pdt.P/2017/PN. Bla/71) ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية في تولونغاغونغ ، 2023 ، المشرف: الأستاذ الدكتور إفاتين نور ، M.Ag.

الكلمات المفتاحية: التأسيس، والزواج بين الأديان، ومقاصد الشريعة

كان الدافع وراء هذا البحث هو ظاهرة صعود الزواج بين الأديان التي حدثت في إندونيسيا. في الواقع ، إذا نظرت إلى اللوائح الحالية في إندونيسيا ، فإن معظم الأحكام تؤدي إلى حظر الزواج بين الأديان ، إذا كان الدين لا يسمح بذلك. ويبدو أن هذا هو الحال في الفقرة 1 من المادة 2 من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج، والمادة 8 الحرف (و) من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج، وفتاوى مجلس الكنائس الإسلامي و KHI، وبعض الكنائس في المسيحية والهندوسية وفي العديد من قرارات المحكمة الدستورية. ومع ذلك ، فإن اللوائح المتعلقة بالزواج بين الأديان في إندونيسيا تتناقض مع النظر في المادة 21 من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج إلى جانب المادة 35 الحرف (أ) من القانون رقم 23 لعام 2006 والمادة 10 الفقرة 3 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 التي يستخدمها القضاة كأساس للنظر للسماح بتنفيذ وتسجيل الزيجات بين الأديان. في الواقع ، إذا نظرت إلى التأثير الذي يمكن أن يحدث على الزواج بين الأديان ، فمن المؤكد أنه يسبب الكثير من المفسادات.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي أساس نظر القاضي والمنطق القانوني وتقرير عمار في حالة طلبات الزواج بين الأديان في القرار رقم Pdt.P / 2022 / PN. Sby / 916 والمرسوم رقم Pdt.P/2017/PN Bla/71، وما هو منظور مقاصد السياريعة بشأن قراري الزواج بين الأديان؟ الغرض من هذه الدراسة هو وصف أساس الاعتبارات القانونية والمنطق القانوني وتقرير عمار في حالة طلبات الزواج بين الأديان في القرار رقم Pdt.P / 2022 / PN. Sby / 916 والمرسوم رقم Pdt.P/2017/PN Bla/71 ووصف القرارين من منظور مقاصد السياريعة

استخدمت هذه الدراسة أبحاث المكتبات. في هذه الدراسة ، كانت تقنية جمع البيانات المستخدمة هي التوثيق. يستخدم هذا البحث أساليب تحليل المحتوى والتحليل المقارن والتحليل النقدي. التحقق من صحة البيانات المستخدمة من قبل الباحثين هو التثليث ، أي عن طريق التوثيق والملاحظة والمقابلات. في إجراء البحوث ، يستخدم الباحثون إجراءات البحث ، وهي التخطيط والتنفيذ والمراحل النهائية (الاستنتاجات والاقتراحات).

نتائج هذه الدراسة هي: 1) محكمة مقاطعة سورابايا ، وافقت أخيرا على الطلب العام. كان أساس النظر الذي استخدمه القاضي هو فقه قرار المحكمة العليا رقم 1400 K / Pdt / 1986 بتاريخ 20 يناير 1989 والذي بموجبه لا يمكن استخدام الفقرة 1 من المادة 2 من قانون الزواج بحيث يكون هناك فراغ قانوني. ولملء الفراغ القانوني، استخدم القاضي المادة 35 من قانون إدارة السكان. ويفسر قضاة الخلافات الدينية المادة 8 من الفقرة (و) من قانون الزواج بأنها لا تحظر الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، نظر القاضي أيضا في مادة شرط الزواج استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من قانون الزواج. يستخدم القضاة المادتين 28 و 29 من دستور عام 1945 كاعتبارات أخلاقية. يستخدم القاضي الفقرة (3) من المادة 10 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 كحجة له للإجراءات التي يمكن أن يقوم بها المتقدمون. طريقة الاكتشاف القانوني المستخدمة هي التفسير التقييدي والنحوي والمقارن والتفسيري. وفي الوقت نفسه، رفضت محكمة مقاطعة بلورا في قرارها الطلب بأكمله. ويستخدم القضاة المادة 1 من قانون الزواج لتصنيف هذه الحالة في قضايا الزواج. ويستخدم القضاة الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من قانون الزواج للنظر في الاحتياجات المادية. تستخدم الفقرة (1) من المادة 2 من قانون الزواج كأساس لحجة القاضي للنظر في الصحة على أساس الدين باستخدام الفقرة 221 من البقرة والمادة 44 من KHI والشاهد يانتو بانداجيان وهو قس في كنيسة GBI Arumdalo. طرق الاكتشاف القانوني التي يستخدمها القضاة هي الحجة لكل قياس ، والتفسير النحوي ، والتفسير متعدد التخصصات. بشكل عام ، يستخدم كل من هذه التسميات تفسيرا منهجيا. 2) في قضية مقاصد الصيارعة لجمال الدين عطية، لم تحتفظ محكمة مقاطعة سورابايا بحفظ النصب، بل كانت تحرس حفظ النصل. أظهرت محكمة مقاطعة بلورا في قضية المجال العائلي حماية حفظ النصل. في مقاصد الشريعة لجاسر عودة في الطبيعة المعرفية للأنظمة، للاثنين تناقضات ومبررات. لا تظهر محكمة مقاطعة سورابايا نظاما كاملا أو شاملا ، في حين أن محكمة مقاطعة بلورا أقل وضوحا. الانفتاح والتجديد الذاتي في محكمة مقاطعة سورابايا

مرئيان ، محكمة مقاطعة بلورا غير مرئية. في نظام الترابط ، يظهر هذان القراران مقاصد العمة ولكن في حالة مقاصد خصاه ، بينما في مقاصد جزائية ، لا يشير قرار محكمة سورابايا إلى حمايته ويظهر قرار محكمة مقاطعة بلورا. كل من هذه المهام تستخدم أيضا نظاما متعدد الأبعاد. وفيما يتعلق بالتعزم، لم يظهر قرار محكمة مقاطعة سورابايا الحراسة، في حين أظهر قرار محكمة مقاطعة بلورا.